

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- A. Raharjo, *Forensik Digital dalam Pembuktian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).
- Harli Siregar dan Sakafa Gurafa, *Admisibilitas Bukti Elektronik Dalam Persidangan*, (Depok: Rajawali Pers. 2023)
- Jamba, Padrisan, et al. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (CV. Gita Lentera, 2023.)
- Johanes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. (Jakarta: Rineka Cipta: Jakarta. 2003).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018),.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012)
- Prodjohamidjojo , *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Penerbit Chalia Indonesia, 1983)
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana kontemporer*(Jakarta: Citra Aditya 2007)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Jurnal

- Alouisius Alan Sanjaya, Made Sugi Hartono, & Si Ngurah Ardhya, *Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Penyidikan*, (Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5 No. 2. 2023): 44-56.
- Agustina, S. *Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana*. Masalah-Masalah Hukum, 44(4). 2019)
- Beniartini, *Pengembangan Alat-Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Manado: Lex Crimen 9, no. 2. 2020).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. (Semarang: Gema Keadilan 7.1, 2020):
- Dani, R., Nawi, S., & Halid, H. *Kekuatan Hukum Hasil Uji Balistik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan Berencana*. (Journal of Lex Generalis. 1(4). 2021)
- Dimas Wicaksono & Arum Lestari, *Kendala Pembuktian Digital Forensik dalam Tindak Pidana Siber*, (Jurnal Ilmu Hukum Nusantara, Vol. 10 No. 2. 2022): 133-145.
- Edmon Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4. 2019)
- Edwin Setiawan & Hartiwiningsih, *Pemanfaatan Digital Forensik dan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik*, (Solo: Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, 2024)
- Elvina Tanoto, Jesslyn Tandy, & Ricky Banke, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian di Peradilan Pidana*, (Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 2024): 90-96
- Fahrudin, Azis, Muflih. *Analisis Forensik Digital Pada Pesan Whatsapp Yang Terenkripsi Dengan Pretty Good Privacy (PGP) Menggunakan Framework DFRWS*. (JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 9.1. 2025)

- Faisal Syukri, *Penggunaan Bukti Digital dalam Persidangan Pidana: Antara Validitas dan Keadilan*, (Bengkulu: Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024)
- Fajrini Faizah & Moh. Karim, *Kekuatan Alat Bukti terhadap Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*, (Madura: Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 3 No. 1, 2025).
- Hidayat, *Konsistensi Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Elektronik*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan 54. 2024).
- Josua Sitompul, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),
- Lailatul Arofah, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian,” (Jakarta: Badilag Mahkamah Agung, 2022)
- Literasi Hukum, *Memahami Sistem Pembuktian Pidana*, (Bandung: Literasi Hukum Indonesia, 2021).
- Karisa, Anindya. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid. Sus. Anak/2014. PN. Kln. Verstek 8.1 (2020).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Jurnal Integritas KPK, 2020
- Mahkamah Agung RI, *Meluruskan Beban Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Marinews Mahkamah Agung RI, 2023)
- Manope, *Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, (Manado: Lex Crimen 6, no. 2. 2017)
- Manurung. Krisnawati, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*, (Kertha Desa 10, no. 5 2022).
- Maronie, Sherief. *Implementasi Penanganan Barang Bukti Elektronik dan Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan*. (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2025)

- Nabila Rahmawati, *Analisis Kendala Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber di Indonesia*, (Jurnal Lex Technologia 8, no. 2. 2023)
- Nelson, Rivan. *Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. (Lex Privatum 10.5 (2022).
- Nuarta, I. N., & Santhi, N. N. P. P. *Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern*. (Jakarta: Kertha Wicaksana, 18(1). 2024)
- Nur Rahmawati, *Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian*, Pengadilan Agama Tarakan (2023)
- Nurlaila Isima, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, (Manado: Gorontalo law Review. Volume 5 No.1 - April 2022)
- Purindrasari, Zain, *Jaminan Keamanan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan*. (Soedirman Law Review 6, no. 1 2024).
- Rahmatika, *Urgensi Standarisasi Kompetensi Saksi Ahli Digital Forensik*, (Indonesian Journal of Criminal Law 6, no. 2. 2023)
- Rika Nurmala & Indah Puspita, *Perlindungan Korban dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, (Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 9 No. 1. 2023): 15-26
- Saputra. Syahuri, *Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap Independensi Hakim di Indonesia*, (Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 1, no. 3. 2024).
- Silooy. Sumanto, *Hilangnya Independensi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara*, (Journal of Law, Administration, and Social Science 4, no. 5. 2024)
- Sucia, Yossiramah, and Deswari. *Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan: Memahami Peran dan Validitasnya*. (Innovative: Journal Of Social Science Research 4.4 2024):
- Syafrinaldi, *Rekonstruksi Pembuktian Digital dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal Yustisia, Vol. 9 No. 1. 2023),

Trianto. Hakim, *Analisis Hukum tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan*, (Jurnal Dimensi Hukum 8, no. 5. 2024).

Wibowo, *Kredibilitas Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian Pidana*, (Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 4 No. 2. 2022).

Yuli Anggraini, *Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik dan Kredibilitasnya dalam Pembuktian Hukum Pidana*, (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 8. 2024): 1-10.

Internet

HT Legal Consult, *Pembuktian Elektronik: Bagaimana Pengaturannya?*, 2020.
<https://htlegalconsult.com/pembuktian-elektronik-bagaimana-pengaturannya/>

ILS Law Firm, *Beban Pembuktian Perkara Pidana*, (Jakarta: ILS Law Firm, 2022),
<https://www.ilslawfirm.co.id/beban-pembuktian-perkara-pidana/>

Kuliah Hukum, *Definisi Hukum Pembuktian Pidana*, (Yogyakarta: Kuliah Hukum Press, 2021).

Maarif, Syamsul. (2024, 24 Juli), *Masalah Alat Bukti Elektronik di Sidang Pengadilan (Bagian Akhir)*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-alat-bukti-elektronik-di-sidang-pengadilan-bagian-akhir-lt66a081e52d804/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023*.

Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN.Btl, Pengadilan Bantul

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbuahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana